

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Inayah Nya kita sekalian telah diberikan nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul.

Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Kota Bekasi mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepannya dibidang kepegawaian. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi lebih konkrit. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka menengah dan acuan rencana kerja tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini telah disusun dengan tetap memperhatikan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025–2045, hasil evaluasi capaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, khususnya pembangunan nasional bidang aparatur.

Dengan demikian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam rangka RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 pembangunan kepegawaian telah memperhatikan arah kebijakan dan program strategis pembangunan bidang aparatur.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini, kiranya dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara di Kota Bekasi melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah dan mengakomodasi isu strategis yang berkembang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi khususnya dan pada umumnya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang dalam mengemban visi dan misi sesuai dengan amanah dan tugas fungsinya.

Bekasi,

Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19741012 200604 1 016

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_Toc207891067)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc207891068)

[DAFTAR TABEL v](#_Toc207891069)

[DAFTAR GAMBAR vii](#_Toc207891070)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc207891071)

[1.1. LATAR BELAKANG 1](#_Toc207891072)

[1.2. LANDASAN HUKUM 6](#_Toc207891073)

[1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 8](#_Toc207891074)

[1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 9](#_Toc207891075)

[BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11](#_Toc207891076)

[**2.1.** **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** 11](#_Toc207891077)

[2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BPBD Kota Bekasi 11](#_Toc207891078)

[2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 18](#_Toc207891079)

[2.1.3 Sarana dan Prasarana 22](#_Toc207891080)

[2.1.4 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24](#_Toc207891081)

[2.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 34](#_Toc207891082)

[**2.2.** **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Bekasi** 39](#_Toc207891083)

[**2.3.** **Standar Pelayanan Minimal** 47](#_Toc207891084)

[**2.4.** **Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** 47](#_Toc207891085)

[**2.5.** **Pengelolaan Kebencanaan di Daerah** 48](#_Toc207891086)

[**2.6.** **Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah** 51](#_Toc207891087)

[2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40](#_Toc207891088)

[2.6.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 42](#_Toc207891089)

[2.6.2.1 Telaahan Renstra BNPB 42](#_Toc207891090)

[2.6.2.2 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa barat 52](#_Toc207891091)

[2.6.2.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 53](#_Toc207891092)

[**2.7.** **Penentuan Isu-isu Strategis** 54](#_Toc207891093)

[**2.8.** **Indek Risiko Bencana di Kota Bekasi** 56](#_Toc207891094)

[BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 58](#_Toc207891095)

[**3.1.** **Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029** 58](#_Toc207891096)

[**3.2.** **Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daearh Kota Bekasi Tahun 2025-2029** 61](#_Toc207891097)

[3.2.1 Sasaran terkait Tujuan Ke-1 62](#_Toc207891098)

[3.2.2 Sasaran terkait Tujuan Ke-5 **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc207891099)

[**3.3.** **Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029** 65](#_Toc207891100)

[**3.4. Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029** 67](#_Toc207891101)

[BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 70](#_Toc207891102)

[**4.1.** **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** 70](#_Toc207891103)

[**4.2.** **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** 92](#_Toc207891104)

[4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 92](#_Toc207891105)

[4.2.2 Indikator Kinerja Kunci 94](#_Toc207891106)

[4.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal 94](#_Toc207891107)

[BAB V PENUTUP 96](#_Toc207891108)

[**5.1.** **Kesimpulan** 96](#_Toc207891109)

[**5.2.** **Kaidah Pelaksanaan Umum** 96](#_Toc207891110)

[**5.3.** **Faktor Kunci Keberhasilan** 96](#_Toc207891111)

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.2 : Pegawai berdasarkan golongan/ruang

Tabel 2.3 : Pegawai berdasarkan jabatan

Tabel 2.4 : Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.5 : Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusi (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Tabel 2.6 : Rincian kebutuhan Diklat

Tabel 2.7 : Sarana dan Prasarana

Tabel 2.8 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Tabel 2.9 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Tabel 2.10 : Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tabel 2.11 : Pelayanan Dasar Serta Penerima Pelayanan Dasar

Tabel 2.12 : Capaian standar pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Tabel 2.13 : Target, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategis Dan Program Kegiatan

Tabel 2.14 : Permasalahan yang di hadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Tabel 2.15 : Permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan sasaran Renstra BNPB beserta Faktor penghambatan dan pendorong keberhasilan penanganannya

Tabel 2.16 : Permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor penghambatan dan pendorong keberhasilan penanganannya

Tabel 2.17 : Permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta Faktor penghambatan dan pendorong keberhasilan penanganannya

Tabel. 2.18 : Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.19 : Indeks Resiko Bencana Kota Bekasi

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Tabel 4.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 4.2 : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2026-2030

Tabel 4.3 : Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029

Tabel 4.4 : Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Tabel 4.5 : Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daearah

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gambar 2.2 : Kelompok Sasaran Pelayanan

Gambar 2.3 : Standar Pelayanan Minimal

# BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kota Bekasi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan agar mengarahkan organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi. Renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/979/BAPPELITBANGDA.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi akan melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Renstra BPBD Kota Bekasi mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

1. Diperlukan untuk mengantisipasi globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong BPBD untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, BPBD dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

1. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis, BPBD dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1. Berorientasi pada masa depan

Sumber daya yang strategis memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh, untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

1. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

1. Pelayanan Prima (Service Excelence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima.

Untuk itu pola- pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

1. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean goverment) Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis BPBD merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Tahun 2025-2029 indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD BPBD, program lintas SKPD, dan Program lintas wilayah.

Proses penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 meperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang prosesnya berjalan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD, antara lain :

1. Persiapan penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Renstra;
4. Forum perangkat Daerah Pembahasan Rancangan Renstra;
5. Verifikasi Rancangan Renstra;
6. Perumusan Rancangan akhir Renstra;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra;
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra; dan
9. Penetapan Renstra.

*Gambar 1.1.*

*Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daearah*



*Sumber: Kementerian Dalam Negeri*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan disertai rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 khususnya terkait urusan perencanaan dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sementara terkait urusan penelitian dan pengembangan, dalam prosesnya menelaah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2026 sampai dengan 2029 dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2025 sampai dengan 2029.

Dengan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 N0. 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan Dan Penganggaran Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
27. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dilingkungan pemerintah Kota Bekasi;
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

**1. Maksud**

Renstra Badan Penanggulangan Becana Daerah Kota Bekasi 2025 – 2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan selama perioden 5 (lima) tahun yang bertujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

**2. Tujuan**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khusunya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota bekasi dalam melaksanan kan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
3. Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025-2029 disusun dengan sistematika sebaga berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstral. Selain itu, dikemukan dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah antara lain tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja penyelenggaran pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran layanan.

Selanjutnya dikemukakan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis Perangkat Daerah.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

BAB ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksana.

# 

# BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

**2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

* + 1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 seri D), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Seri E); Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang melaksanakan Sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Perincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksaan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebencanaan. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pelaksana terdiri dari :
3. Kepala Pelaksana
4. Sekretaris Pelaksana
5. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
7. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
8. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
9. Kelompok Jabatan Pelaksana Teknis Lapangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan di Seksi penanggulangan bencana.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
2. penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
3. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penangaan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
4. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
5. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penganggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
7. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
8. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, Lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
9. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
10. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Uraian Tugas adalah sebagai berikut :
12. menetapkan dan menyelenggarakan Program dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
14. menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kegiatan Sekretaris dan para Kepala Seksi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
16. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah- langkah lainnya;
17. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja;
18. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan;
20. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan dokumen atau naskah kedinasan yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Seksi Intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ;
21. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
22. menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
23. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
24. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pembina. Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
2. pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
4. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Seksi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pembina. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
7. perumusan kebijakan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
8. pelaksanaan kebijakan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
10. pelaksanaan administrasi badan di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
12. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pembina. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di Seksi Kedaruratan dan Logistik. Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
13. perumusan kebijakan pada seksi Kedaruratan dan Logistik;
14. pelaksanaan kebijakan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
15. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
16. pelaksanaan administrasi badan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
18. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pembina. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
19. perumusan kebijakan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
20. pelaksanaan kebijakan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
21. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
22. pelaksanaan administrasi badan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
24. Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan Seksi keahlian dan keterampilan.
25. Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.Nama nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

*Gambar 2.1*

*Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

**KEPALA SEKSI REHABILITAS DAN REKONTRUKSI**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCAAN DAERAH**

**(SEKRETARIS DAERAH)**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**SEKRETARIS PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

**KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

**KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN**

* + 1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Rincian Secara lengkap SDM Perangkat Daerah yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 2.1*

*Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS**  **KEPEGAWAIAN** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | | | | | | | | |
| **S2** | **S1** | **D3** | **D2** | **D1** | **SLTA** | **SLTP** | **SD** | **JML** |
| PNS | 4 | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 12 |
| PPPK |  | 9 |  |  |  | 28 | 2 | 1 | 40 |
| TKK |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| PHL |  | 5 | 2 |  |  | 26 |  |  | 33 |
| **JUMLAH** | **4** | **19** | **2** |  |  | **58** | **2** | **1** | **86** |

1. Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

*Tabel 2.2*

*Pegawai berdasarkan golongan/ruang*

| **No** | **Pangkat / Golongan** | **Jumlah** | **Satuan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pembina Tingkat I (IV.b) | 1 | Orang |
| 2. | Pembina (IV.a) | 2 | Orang |
| 3. | Penata Tingkat I (III.d) | 5 | Orang |
| 4. | Penata (III.c) | 1 | Orang |
| 5. | Penata Muda (III.a) | 1 | Orang |
| 6. | Pengatur Tingkat I (II.d) | 1 | Orang |
| 7. | Pengatur (II.c) | 1 | Orang |
| **Jumlah** | | **12** | **Orang** |

1. Pegawai berdasarkan Jabatan

*Tabel 2.3*

*Pegawai berdasarkan jabatan*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Jumlah** | **Satuan** |
| 1 | Kepala Pelaksana | 1 | Orang |
| 2 | Sekretaris | 1 | Orang |
| 4 | Kepala Seksi | 3 | Orang |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum | 7 | Orang |
| **Jumlah** | | **12** | **Orang** |

1. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

*Tabel 2.4*

*Pegawai berdasarkan jenis kelamin*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URIAN** | **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **JUMLAH** |
| 1 | PNS | 9 orang | 3 orang | 12 orang |
| 2 | PPPK | 34 orang | 6 orang | 40 orang |
| 3 | TKK | 1 orang | - | 1 orang |
| 3 | PHL | 30 orang | 3 orang | 33 Orang |

Melihat tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang begitu banyak tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Dikarenakan kekurangan SDM khusus nya pada jabatan fungsional / kategori keterampilan, maka dibutuhkan penambahan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang mempunyai kredibilitas dalam management penanggulangan bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana baik dari segi kualitas dan kauntitas. Sebagai acuan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

*Tabel 2.5*

*Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusi (SDM) Badan Penanggulangan Bencana*

*Daerah Kota Bekasi*

| **NO** | **JABATAN** | **ESELON** | **PENDIDIKAN** | **SATUAN** | **JUMLAH**  **KEBUTUHAN** | **EKSISTING**  **SAAT INI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kepala Pelaksana | III.b | S2/S3 | Orang | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris Badan | IV.a | S1/S2 | Orang | 1 | 0 |
| 3. | Kepala Seksi Pencegahan  dan Kesiapsiagaan | IV.a | S1/S2 | Orang | 1 | 0 |
| 4. | Kepala Seksi Kedaruratan  dan logistik | IV.a | S1/S2 | Orang | 1 | 1 |
| 5. | Kepala Seksi Rehabalitasi  dan Rekontruksi | IV.a | S1/S2 | Orang | 1 | 1 |
| 6. | Kepala Pusdalops |  | S1/S2 | Orang | 1 | 0 |
| 7. | Pengelola Kepegawaian |  | D3/S1 | Orang | 3 | 0 |
| 8. | Analis Kepegawaian |  | D3/S1 | Orang | 1 | 1 |
| 9. | Pengelola Keuangan |  | D3/S1 | Orang | 2 | 0 |
| 10. | Analis Perencanaan Evaluasi  dan Pelaporan |  | D3/S1 | Orang | 1 | 0 |
| 11. | Pengelola Bahan  Perencanaan |  | D3/S1 | Orang | 3 | 0 |
| 12. | Bendahara Pengeluaran |  | S1/S2 | Orang | 1 | 1 |
| 13. | Verifikator Keuangan |  | D3/S1 | Orang | 3 | 2 |
| 14. | Pengelola Laporan Keuangan |  | D3/S1 | Orang | 1 | 0 |
| 15. | Bendahara Pembantu Barang |  | S1 | Orang | 1 | 1 |
| 16. | pengelola Barang BMD |  | S1 | Orang | 1 | 1 |
| 17. | Akutansi |  | S1 – ekonomi /  manajement | Orang | 2 | 0 |
| 18. | Analis Bencana |  | S1 | Orang | 3 | 1 |
| 19. | Analis Mitigasi Bencana |  | S1 | Orang | 3 | 1 |
| 20. | Pengelola Barang dan Jasa |  | S1 | Orang | 1 | 0 |
| **JABATAN FUNGSIONAL** | | | | | | |
| 22. | Pranata Bencana |  | D3/S1 | Orang | 3 | 0 |
| 23. | Pranata Humas |  | D3/S1 | Orang | 3 | 0 |
| 24. | Arsiparis |  | D3/S1 | Orang | 3 | 0 |
| 25. | Pengelola data |  |  |  |  |  |
| 26. | Operator Pusdalops |  | SMA / D3 / S1 | Orang | 5 | 0 |
| 27. | Tim Reaksi Cepat (TRC) |  | SMA / D3 / S1 | Orang | 95 | 0 |
| **JUMLAH** | | | | **Orang** | **141** | **11** |

Sumber : Data kepegawaian tahun 2025

Selain sumber daya manusia (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga masih membutuhkan personil berkompetensi baik secara kuantitas dan kualitas. Berikut rincian kebutuhan diklat Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

*Tabel. 2.6*

*Rincian kebutuhan Diklat*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama Diklat** | **Target** | **Diklat yang pernah diikuti** | | **Terakomodir dalam kegiatan dan sub kegiatan** |
| **Sudah** | **Belum** |
| 1. | Senior Disaster Manajemen Resiko | 1 orang | - | - | Ada |
| 2. | Manajemen Resiko | 20 orang | - | - | Ada |
| 3. | Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan | 6 orang | - | - | Ada |
| 4. | Pelatihan Tanggap Darurat Bencana | 8 orang | - | - | Ada |
| 5. | Pelatihan Kaji Cepat | 6 orang | - | - | Ada |
| 6. | Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) | 15 orang | - | - | Ada |
| 7. | Pemanfaatan Teknologi Drone untuk Pemetaan Tata Ruang dan Analisis Kebencanaan | 4 orang | - | - | Ada |
| 8. | Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 35 orang | - | - | Ada |
| 9. | Pelatihan Bendahara | 2 orang | - | - | Ada |
| 10. | Pelatihan dan Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan | 7 orang | - | - | Ada |
| 11. | Penyusunan Laporan Keuangan | 2 orang | - | - | Ada |
| 12. | Penyusunan Anggaran | 5 orang | - | - | Ada |
| 13. | Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah | 5 orang | - | - | Ada |
| 14. | Manajemen Aset | 4 orang | - | - | Ada |
| 15. | Pelatihan Kearsipan | 5 orang | - | - | Ada |
| **Jumlah Pelatihan/Bimtek (5 tahun)** | | **125 orang** |  |  |  |

* + 1. Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

*Tabel. 2.7*

*Sarana dan Prasarana*

| NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | SATUAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- |
| ALAT BESAR | | | |
| 1. | Water Treatment (Mesin Proses) | Unit | 1 |
| 2. | Portable Generating Set | Unit | 10 |
| 3. | Pompa lainnya | Unit | 1 |
| KOMPUTER | | | |
| 4. | Mainframe (Komputer Jaringan) | Unit | 1 |
| 5. | P.C unit | Unit | 18 |
| 6. | Laptop | Unit | 12 |
| 7. | Note Book | Unit | 6 |
| 8. | Hard Disk | Unit | 4 |
| 9. | Monitor | Unit | 1 |
| 10. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Unit | 29 |
| 11. | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | Unit | 1 |
| ALAT KESELAMATAN KERJA | | | |
| 12. | Tenda | Unit | 41 |
| 13. | Tenda Pleton | Unit | 12 |
| 14. | Tenda Lorong | Unit | 5 |
| 15. | Mini Bus (untuk Kapasitas 14 orang kebawah) | Unit | 6 |
| 16. | Pick up | Unit | 3 |
| 17. | Sepeda Motor | Unit | 11 |
| 18. | Mobil Tangki air | Unit | 1 |
| 19. | Kendaraan Bermotor Khusus lainya | Unit | 1 |
| 20. | Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya | Unit | 1 |
| 21. | Motor Boat | Unit | 4 |
| 22. | Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya | Unit | 4 |
| 23. | Out boat motor | Unit | 1 |
| 24. | Alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang  lainnya | Unit | 3 |
| ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | | | |
| 25. | Perkakas bengkel listrik lainnya | Unit | 1 |
| 26. | Gergaji Chain Saw | Unit | 12 |
| ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | | | |
| 27. | Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13 inci) | Unit | 1 |
| 28. | Lemari Besi / Metal | Unit | 19 |
| 29. | Lemari Kayu | Unit | 1 |
| 30. | Filing Cabiner Besi | Unit | 25 |
| 31. | Lemari Kaca | Unit | 3 |
| 32. | Alat Penghancur kertas | Unit | 5 |
| 33. | Mesin Absensi | Unit | 1 |
| 34. | Overhead projector | Unit | 5 |
| 35. | Papan Tulis | Unit | 3 |
| 36. | Alat Kantor lainnya | Unit | 16 |
| 37. | Meja Telepon | Unit | 1 |
| 38. | Meja ½ biro | Unit | 31 |
| 39 | Meja Komputer | Unit | 4 |
| 40. | Sofa | Unit | 5 |
| 41 | Meubeler lainnya | Unit | 10 |
| 42. | Lemari es | Unit | 2 |
| 43. | Televisi | Unit | 3 |
| 44. | Sound system | Unit | 1 |
| 45. | Camera video | Unit | 2 |
| 46. | Camera film | Unit | 1 |
| 47. | Tangga Aluminium | Unit | 2 |
| 48. | Alat Rumah Tangga lain – lain | Unit | 27 |
| 49. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | Unit | 2 |
| 50. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Unit | 6 |
| 51. | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | Unit | 2 |
| 52. | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Unit | 35 |
| 53. | Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD | Unit | 1 |
| 54. | Kursi Kerja Pejabat lainnya | Unit | 1 |
| 55. | Kursi Tamu diruangan eselon III | Unit | 1 |
| 56. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Unit | 1 |
| 57. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Unit | 3 |
| 58. | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Unit | 57 |
| 59. | CCTV – Camera Control Television System | Unit | 10 |
| 60. | Mesin Fogging | Unit | 3 |
| 61. | Meja Rapat | Unit | 1 |
| 62. | Meja Tambahan | Unit | 1 |
| 63. | Kursi Rapat | Unit | 50 |
| 64. | A.C. Split | Unit | 4 |
| 65. | Drone | Unit | 1 |
| ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | | | |
| 66. | Professional Sound System | Unit | 1 |
| 67. | Telephone Mobile | Unit | 2 |
| 68. | Handy Talky (HT) | Unit | 55 |
| 69. | Fax smile | Unit | 1 |
| 70. | Encoder/Decoder | Unit | 4 |
| 71. | Celling Mount Bracket | Unit | 4 |
| 72. | LCD Monitor | Unit | 4 |
| ALAT RESCUE | | | |
| 73. | Alat Selam | Unit | 4 |
| 74. | Tali Kamantel Static | Unit | 2 |
| 75. | body harness full set | Unit | 13 |
| 76. | Ascender | Unit | 4 |
| 77. | Helm rescues | Unit | 23 |
| 78. | Fin | Unit | 8 |
| 79. | Sepatu Karang | Unit | 4 |
| 80. | Google Glass | Unit | 4 |
| 81. | Snorkel | Unit | 4 |
| 82. | Baju Selam | Unit | 4 |
| 83. | Pemberat | Unit | 8 |
| 84. | Tabung Oksigen | Unit | 4 |

* + 1. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di tuntut terus untuk melakukan peran dan fungsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak dan mendesak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana) saat “siaga darurat”, maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

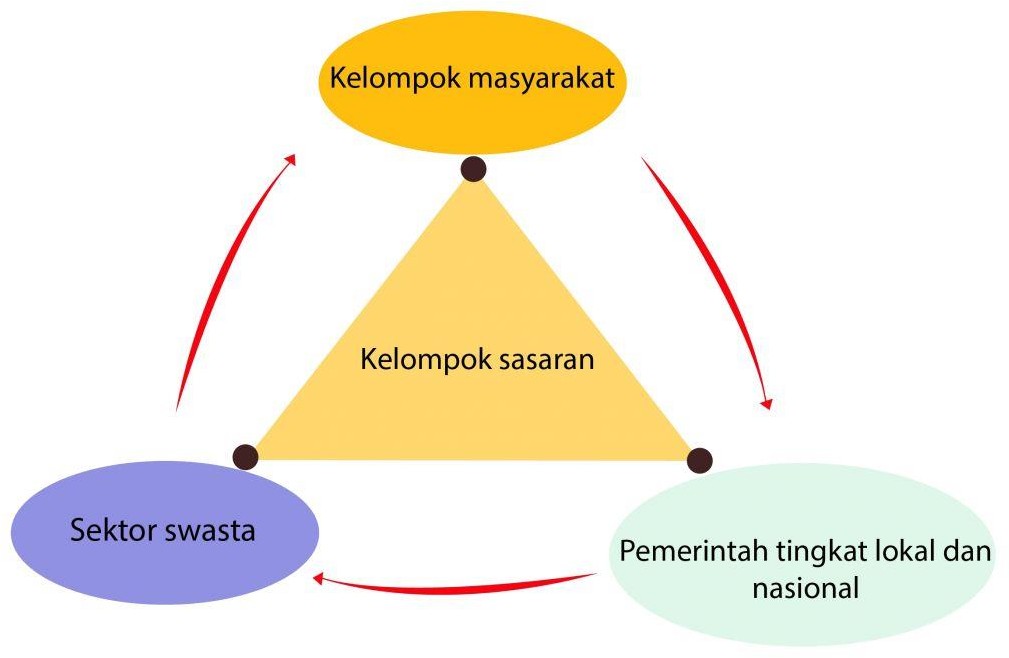
Apabila diterapkan ke dalam tiga program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana, Pengurangan Risiko Bencana merupakan siklus sistemik kegiatan. Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daearah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 difokuskan pada hal-hal :

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Gambar. 2.2*

*Kelompok Sasaran Pelayanan*



Dalam pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berdaya dan bisa menolong diri mereka sendiri. Merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), masyarakat wajib ikut dilibatkan dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Keterlibatan masyarakat tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, mendorong memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Mendapatkan hak informasi yang benar tentang potensi ancaman bencana dan upaya penanggulangan bencana.

Tabel 2.8

Peran Penta Helix, Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Unsur Non Pemerintah

|  |  |
| --- | --- |
| **Stakeholder** | **Peran** |
| 1. Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Forum Masyarakat | * Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau NonGovernment Organization (NGO) yang memiliki concern dan peran aktif dalam advokasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana diharapkan aktif berjejaring secara kolaboratif dan inklusif dalam Penanggulangan Bencana. * Masyarakat yang berdaulat, Tangguh, yang menjadi salah satu hak warga (civic right) untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman, termasuk dari ancaman bencana. Warga Masyarakat yang berdaulat, termasuk organisasi Masyarakat sipil untuk meng advokasi pemenuhan hak-hak warga, termasuk dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. |
| 1. Akademisi | * Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi diharapkan secara keilmuan mempromosikan, advokasi, serta mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana. Dengan berperan aktif melakukan kajian riset bencana, pemberian rekomendasi dalam pengurangan risiko bencana; * Ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; * Dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, diharapkan dapat berkontribusi peran sebagai akademisi maupun tenaga ahli yang ikut andil dalam mensupervisi, menyelaraskan, serta memaduserasikan program dalam pengurangan risiko bencana khususnya dokumen RPB. |
| 1. Lembaga Dunia Usaha | * Dalama penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, diharapkan Lembaga dunia usaha berperan dan berkontribusi dalam program pengurangan risiko bencana; |
| 1. Media Massa | * Diharapkan sebagai penyambung informasi dan menyebarluaskan konten berita yang berdasarkan aspek nilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. |

Dalam konteks koordinasi dan kolaborasi, aktor yang terlibat dalam perencanaan bencana, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, memainkan peran penting dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi risiko, mengembangkan rencana tanggap darurat, dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan tepat. Kolaborasi ini juga membantu dalam menghindari duplikasi usaha dan memastikan bahwa semua aspek dari perencanaan bencana tercakup.

Sementara pengumpulan dan penyebaran informasi menekankan aktor-aktor ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi mengenai potensi ancaman, jalur evakuasi, dan lokasi tempat penampungan sangat penting untuk keselamatan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang efektif antara berbagai aktor, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri.

Selain itu, aktor yang terlibat dalam perencanaan bencana juga berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat. Melalui pelatihan, simulasi, dan kampanye kesadaran, mereka dapat membantu masyarakat memahami risiko yang mereka hadapi dan bagaimana cara meresponsnya. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya membantu dalam mengurangi dampak bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.

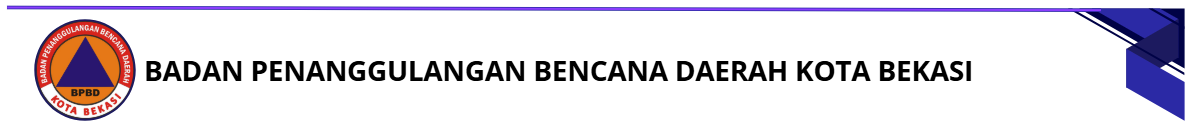
Untuk itu dalam perencanaan mitigasi bencana pentingnya untuk memetakan aktor-aktor yang bertujuan untuk koordinasi kolaborasi, pengumpulan dan penyebaran informasi, hingga peningkatan kapasitas kesadaran masyarakat.

*Tabel 2.8*

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024*

| **NO** | **Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah** | **Target SPM / NSPK** | **Target IKK** | **TARGET CAPAIAN RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE** | | | | | **REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN KE** | | | | | **RASIO CAPAIAN KINERJA TAHUN KE** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** |
| 1 | Indeks Resiko Bencana |  | IKU | 127 | 122 | 118 | 113 | 108 | 131,60 | 123,18 | 124,95 | 111,58 | 111,58 | 103% | 101% | 97,63% | 94,56% | 103% |
| 2 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD |  | IKU | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 72,40 | 42,39 | 50,20 | 60,06 | 67,33 | 95,51% | 55,92% | 66,23% | 79,23% | 88,82% |
| 3 | Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan |  | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,94 | 95.39 | 99.46 | 100.92 | 79,98% | 99.94% | 95,39% | 99.41% | 100.92% |
| 5 | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 100 | 100 | 97.45 | 100 | 100% | 250% | 100% | 97,45% | 100% |
| 6 | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

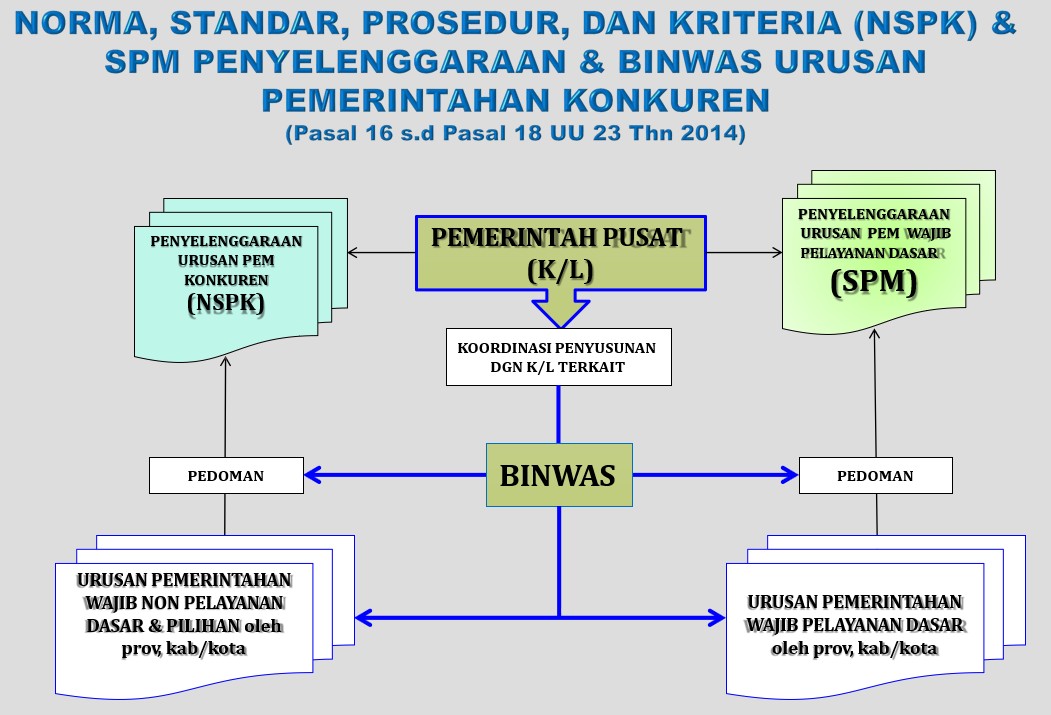
Berdasarkan Tabel di atas, Pencapaian Kinerja Pelayanan meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 khususnya dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) tidak mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan cukup banyaknya kejadian bencana yang terjadi pada Tahun 2023 sehingga mengakibatkan tingginya angka Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi yaitu 111,58 sedangkan target yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi adalah 113 dengan rasio capaian kinerja 94,56%. Sedangkan, untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 mendapatkan nilai 60,06 dengan rasio capaian kinerja 79,23%. Dimana hasil ini dinilai tidak sesuai dengan target Nilai AKIP yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi pada yaitu 75,80. Hasil ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa kegiatan/sub.kegiatan serta dokumen penunjang lainnya tidak dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sedangkan pada Tahun 2024 Pencapaian Kinerja Pelayanan meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi khususnya dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) juga dinilai tidak mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan cukup banyaknya kejadian bencana yang terjadi pada Tahun 2024 sehingga mengakibatkan tingginya angka Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi yaitu 111,58 sedangkan target yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi adalah 108 dengan rasio capaian kinerja 103%. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2024 mendapatkan nilai 67,33 dengan rasio capaian kinerja 88,82%. Dimana hasil ini dinilai tidak sesuai dengan target Nilai AKIP yang ditetapkan oleh BPBD Kota Bekasi pada yaitu 75,80. Hasil ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa kegiatan/sub.kegiatan serta dokumen penunjang lainnya tidak dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan yang telah direncanakan.

28

* + 1. Standar Pelayanan Minimal

*Gambar 2.3*

*Standar Pelayanan Minimal*

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan yang mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga neraga secara minimal, pelaksanaan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai subtansi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan melaksanakan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebagai SPM, SPM diterapkan dan ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar serta penerima pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.11*

*Pelayanan Dasar Serta Penerima Pelayanan Dasar*

| **NO** | **JENIS PELAYANAN DASAR** | **MUTU PELAYANAN DASAR** | **PENERIMA PELAYANAN**  **DASAR** |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PROVINSI | ditetapkan dalam standar  teknis, yang sekurang- kurangnya memuat |  |
| 1. | pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa  standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia  petunjuk teknis atau  tata cara pemenuhan standar |  |
| II | KABUPATEN / KOTA |  |  |
| 1. | pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum |  | Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan  ketertiban umum |
| 2. | pelayanan informasi rawan bencana |  | Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana  dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah  kabupaten/kota. |
| 3. | pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam  menghadapi bencana |
| 4. | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban  bencana |

*Tabel 2.12*

*Capaian standar pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024*

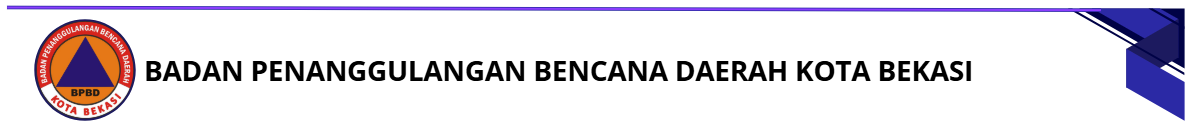
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator kinerja** | **Satuan** | **Target** | | | | | **Realisasi** | | | | | **Capaian** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana | Jiwa | 382.568 | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 14.311 | 381.846 | 648.880 | 790,532 | 188,179 | 14.311 | 99,81 | 99,94 | 95.39 | 99,46 | 100 |
| 2 | Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jiwa | 382.568 | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 14.311 | 227.693 | 427.693 | 790,532 | 184,378 | 14.311 | 59,51 | 65,88 | 95.39 | 97,45 | 100 |
| 3 | Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jiwa | 382.568 | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 14.311 | 382.568 | 649.248 | 828,746 | 189,208 | 14.311 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel 2.12 capaian standar pelayanan minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Tahun 2024 menjadi 100%, yang pada tahun 2023 sebesar 99,46%
2. Indikator Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana di tahun 2024 100% yang dimana pada tahun 2023 sebesar 97,45. Karena antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan / sosialisasi yang di selenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang meningkat.
3. Indikator Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana bertahan setiap tahunnya sebesar 100%, karena upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana / masyarakat yang menjadi korban Bencana sangat optimal.

Untuk capaian indikator kinerja jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang belum tercapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berupaya melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat untuk tercapainya indikator kinerja jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. dibagian ini mengemukakan pada tahun mana saja realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

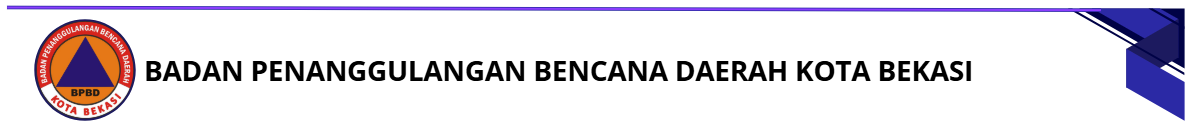


29

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | | Realisasi |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | (19) |
| 1 | Program Penanggulangan Bencana | 3.157.120.000 | 4.787.899.600 | 6.597.048.541 | 5.698.812.861 | 5.964.812.470 | 2.843.704.319 | | 4.323.484.839 | 5.416.702.632 | 5.408.424.226 | 5.306.056.307 | 90,07% | | 90,30% | 82,11% | 94,90% | 88,96% | 20% | | 19% |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.632.127.000 | 4.968.210.400 | 5.047.442.248 | 4.681.669.195 | 4.989.556.910 | 2.383.262.868 | | 4.208.874.400 | 4.230.508.884 | 4.223.230.844 | 4.287.862.115 | 90,54% | | 84,72% | 83,81% | 90,21% | 85,94% | 22% | | 20% |
| **TOTAL** | | **5.789.247.000** | **9.756.110.000** | **11.644.490.789** | **10.380.482.056** | **10.954.369.380** | **5.226.967.187** | | **8.532.359.239** | **9.647.211.516** | **9.631.655.070** | **9.593.918.422** | **90,29%** | | **87,46%** | **82,85%** | **92,79%** | **87,58%** | **21%** | | **19%** |



* + 1. Kelompok sasaran layanan

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan rumpun urusan pemerintahan, di mana yang sebelumnya dikenal dengan urusan wajib dan urusan pilihan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diubah maka menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, di samping itu ditetapkan pula urusan pemerintah umum dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan merupakan urusan konkruen, yaitu merupakan urusan bersama yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan presiden yang kewenangannya didelegasikan dan melekat pada diri Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat. Sementara fungsi penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan daerah dan pengawasan. Ditetapkannya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar didasarkan pada kajian bahwa terdapat beberapa urusan pemerintahan yang merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, meliputi enam urusan wajib yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan sosial dan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana, sub urusan kebakaran, dan sub urusan ketentraman dan ketertiban). Guna menjamin terselenggaranya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkanlah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib di mana setiap warga negara berhak memperolehnya secara minimal.

Untuk mengatur standar pelayanan minimal diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya mengharuskan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 menerapkan standar pelayanan minimal pada enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan target dan realisasi sebesar 100 persen setiap tahun.

Adapun menurut Pasal 3 dalam PP yang sama urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial. Dalam Pasal 3 tersebut termuat urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yang didalamnya memuat sub-urusan ketertiban umum, kebencanaan, dan pemadam kebakaran. Salah satu dari sub urusan tersebut membahas mengenai standar pelayanan minimal dalam kebencanaan.

**Penjelasan terhadap tupoksi layanan**

Permasalahan dan Isue Strategis

* + 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus ditindaklanjuti. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Bekasi yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance. BPBD Kota Bekasi memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga PenanggulanganBencana di Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi ekternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat. Permasalahan lain yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan danpengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam tiga tahun ke depan, rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi antara lain :

*Tabel 2.14*

*Permasalahan yang di hadapi*

*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi*

| **MASALAH** | **PERMASALAH** | **AKAR MASALAH** |
| --- | --- | --- |
| 1. masih belum optimalnya upaya dalam penanggulangan bencana | 1. Permasalahan Sumber Daya Manusian (SDM) | 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan. 2. Kurangnya sumber daya manusia yang memadahi yang sesuai dengan tugasdan fungsinya. 3. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 4. belum semua petugas memiliki kapasitas yang mumpuni dalam darurat bencana |
| 1. Permasalahan Kelembagaan | 1. Tersedinya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum di tetapkan menjadi Peratural Wali Kota atau Keputusan Wali Kota. 2. Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belummaksimal. 3. Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas; 4. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasikebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana 5. Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan 6. Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada system informasi penanggulangan bencana 7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum optimal karena Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh eselon III yang dimana seharusnya Kepala Pelaksana di jabat oleh II. |

* + 1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
       1. Telaahan Renstra BNPB

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 mendukung upaya pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan tersebut dijabarkan melalui misi BNPB tahun 2020-2024. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
4. Memantabkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Kemudian tujuan yang dijabarkan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BNPB Tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut :

*Tabel 2.15*

*Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Bekasi*

*Berdasarkan Sasaran Renstra BNPB beserta Faktor Penghambatan dan Keberhasilan Penanganannya*

| **No** | **Sasaran Jangka Menengah BNPB** | **Permasalahan Pelayanan BPBD** | **Sebagai Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1. | menurunnya risiko  bencana di daerah rawan bencana | * Tersedinya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum di tetapkan menjadi Peratural Wali Kota atau Keputusan Wali Kota. * Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal. * Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas; * Belum tersedinya kajian risiko bencana sampai tingkat kelurahan; * Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui Identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; * Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga – lembaga non- pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non- pemerintah dan masyarakat; * Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana; * Belum semua petugas memiliki kapasitas yang mumpuni dalam darurat bencana | * Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana; * Belum adanya kebijakan operasional penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah; * Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas | * Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana; * Adanya jejaring/ kemitraan dalam bentuk forum- forum pengurangan risiko bencana yang luas. * Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan massif |
| 2. | Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan  darurat bencana |
| 3. | Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam padadaerah  terdampak pasca bencana |
| 4. | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel,dan transparan. |

* + 1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Bekasi

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Bekasi, tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

*Tabel 2.10*

*Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan*

|  |  |
| --- | --- |
| Internal | Eksternal |
| ( + ) Kekuatan | ( + ) Peluang |
| 1. BPBD Kota Bekasi secara legalitas sudah terbentuk sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D) 2. Tersedianya alokasi anggaran BPBD Kota Bekasi dari APBD; 3. Tersedianya Dana Hibah Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD; 4. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan BPBD; 5. Dukungan dana anggaran dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Siap Pakai (DSP) dan Peralatan Logistik berpola dana hibah 6. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,yang menjadi dasar kerjasama dan koordinasi antar jajaran dan stakeholder terkait; 7. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penangan Pengusi Pada Keadaan Darurat Bencana 8. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 9. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi | 1. Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi masih belum memadai; 2. Belum terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga/Perangkat Daerah terkait, khususnya yang terlibat sebagai bagian dari Unsur Pengarah, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan; 3. Proporsi pegawai/SDM sangat minim dan masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas; 4. Belum optimalnya Media Online (Situs WEB) BPBD Kota Bekasi sebagai media peringatan dini dan pencegahan; 5. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perlu ditingkatkan; 6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam; 7. Minimnya sarana dan prasara/ peralatan logistik BPBD Kota Bekasi ; 8. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan dan manajemen bencana dengan pemerintah pusat khusunya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. |
| ( - ) Kelemahan | ( - ) Ancaman |
| 1. Banyaknya Perusahaan/ dunia usaha di Kota Bekasi sehingga terdapat peluang untuk bantuan CSR (Coorporate Social Responsibilities); 2. Adanya dukungan dana APBN dan APBD dalam Penanggulangan Bencana; 3. Adanya dukungan dari masyarakat, relawan dan organisasi kemasyarakatan serta pemerintah 4. Kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kota Bekasi cukup cepat dan pesat | 1. Ancaman Bencana alam dan Non Alam yang tidak dapat diprekdisi kapan dan dimana terjadinya, serta kurangnya kesadaran pada masyarakat tentang risiko bahaya bencana 2. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kota Bekasi 3. Potensi ancaman bencana yang terjadi setiap tahun di Kota Bekasi yaitu Banjir, Pohon Tumbang, Cuaca Exstrim, longsor 4. Banyaknya Gedung-gedung tinggi di Kota Bekasi memberikan ancaman terhadap potensi bencana gempa dan kegagalan teknologi 5. Kurangnya zona hijau/ruang terbuka penyerapan air di Kota Bekasi 6. Banyaknya gorong-gorong/draynase yang tidak optimal mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Kota Bekasi 7. Kiriman Debit air dari hulu sungai Cileungsi yang menyebabkan banjir kiriman diwilayah sepanjang DAS Bekasi |

**2.3. Identifikasi Isue Strategis kebencanaan**

**2.3.1. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Salah satu sasaran dalam MDG maupun SDG adalah memberantas kemiskinan. Artinya pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan jangan malah menyebabkan masyarakat menjadi sengsara, baik dikarenakan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kebencanaan, maupun pembangunan itu sendiri yang justru menyebabkan kejadian bencana. Walaupun di negara maju “End of poverty” merupakan prioritas ke-14, namun di negara berkembang termasuk Indonesia, pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas pertama. Sedangkan pioritas pertama untuk negara maju adalah bagaimana menyikapi tantangan adanya perubahan iklim serta bagaimana dampaknya ke depan Dalam “Review of Maurtius UNISDR Working Papers on Public Invesment Planning and Financing Strategy for Disaster Risk Reduction” yang diterbitkan pada tahun 2015 dijelaskan bahwa Struktur Disaster Risk Management (DRM) terdiri dari (1) Risk Reduction (PRB) dapat berupa pencegahan, mitigasi, dan preparedness; (2) Risk Financing, dapat berupa transfer dan proactive retention; (3) Disaster Management dapat berupa response dan reconstruction Kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, idealnya dalam PRB memasukkan aturan terkait kegiatan pencegahan, yaitu berupa legislasi baik di tingkat nasional maupun daerah untuk melindungi penduduk yang terkena bencana menjadi jatuh miskin.

Seperti misalnya legislasi terhadap hutan lindung sebagai sumber air pertanian, legislasi pembuangan limbah industri yang dapat mengganggu wilayah pertanian dan perikanan, legislasi yang mewajibkan mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam pembangunan infrastruktur, legislasi terkait alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, serta legislasi untuk melindungi pantai dan terumbu karang. Pada Kegatan mitigasi, dilakukan kegiatan pembangunan sistem irigasi bebas banjir, pembangunan terkait penyediaan air untuk mengantisipasi kekeringan, mendesain sistem yang melindungi nelayan terhadap rob. Sedangkan dalam preparedness mensyaratkan BNPB dan BPBD memiliki perencanaan untuk menghadapi bencana, termasuk menyediakan dana siap pakai untuk mengantisipasi terjadinya bencana Dilakukan Pendanaan pengurangan risiko (Risk Financing) pada saat belum terjadi bencana, melakukan kegiatan investasi PRB dan menyusun mekanisme pendanaan pengurangan risiko, yaitu melakukan prediksi investasi apa saja yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana (terutama yang terkait dengan kemiskinan). Misalnya jenis investasi apa yang diperlukan agar penduduk terhindar atau terkurangi risikonya apabila terjadi bencana dan bagaimana skema pembiayaannya, membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan bagaimana skema pembiayaannya, dan mengkoordinasikan implementasi pembiayaan yang saat ini tersebar di berbagai sumber pembiayaan (sektoral, maupun daerah). Selain itu melakukan kegiatan dalam rangka penyediaan dana untuk manajemen bencana, yaitu untuk kerugian dan kehilangan, penilaian peluang risiko bencana (Probabilistic Disaster Risk Assessment), dan perencanaan investasi public (Public Invesment Planning). Pada waktu telah terjadi bencana, dibagi atas tiga kegiatan, yaitu (1) response, berupa penyediaan dana untuk keperluan jika terjadi bencana untuk tanggap darurat; (2) recovery, berupa kegiatan pelatihan ketrampilan dalam rangka pemu-lihan ekonomi dan kegiatan konseling terhadap penduduk korban bencana; (3) reconstruction, yaitu membangun infrastruktur, mengembalikan fungsi pasar, mengembalikan fungsi pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan dapat kembali mencari nafkah. Sedangkan dalam DM, melakukan kegiatan terkait dengan mekanisme pengelolaan pada saat tanggap darurat, mekanisme pengelolaan untuk pemulihan paska bencana, serta mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi.

**2.3.2. Pengelolaan Kebencanaan di Daerah**

Pendanaan penurunan risiko pada saat sebelum terjadi bencana, di tingkat pusat sudah dilakukan pemetaan daerah rawan bencana sehingga dapat memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana.

Pada tingkat daerah hampir semua pengelola kebencanaan di lokasi kajian kurang mempersiapkan pengelolaan kebencanan dengan baik, selain keterbatasan dana yang tersedia di daerah, juga keterbatasan kapasitas untuk dapat menghitung risiko bencana dan juga dalam identifikasi daerah rawan bencana, demikian juga dengan upaya untuk membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan bagaimana skema pembiayaannya, masih belum terlihat dalam penganggaran maupun dalam rencana aksi. Bahkan ada daerah yang baru membentuk BPBD setelah kejadian bencana berlangsung dalam waktu lama.

Belum ada daerah yang telah menyediakan dana yang dikhususkan untuk kegiatan Disaster Loss, Probabilistic Disaster Risk Assessment, dan Public Invesment Planning. Kegiatan yang sudah dilakukan di daerah secara umum berupa kegiatan pada waktu telah terjadi bencana walaupun secara umum jumlahnya masih belum mencukupi, penyediaan dana untuk tanggap darurat sebagian dimasukkan dalam dana tidak terduga. Sedangkan dana untuk recovery dan reconstruction secara umum masih dianggarkan di tingkat sektoral. Sedangkan kekurangan dana untuk kegiatan ini diharapkan dapat ditanggulangi oleh tingkat Pusat. Pada manajemen bencana, bagi daerah yang telah membentuk BPBD secara umum telah memiliki prosedur operasional baku pada saat tanggap darurat, yaitu komando dipegang oleh BPBD. Sedangkan dalam mekanisme pengelolaan pada saat paska tanggap darurat, mekanisme pengelolaan untuk pemulihan paska bencana dan mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait melalui koordinasi dari BPBD.

Hanya saja beberapa daerah masih menghadapi kendala baik pembiayaan maupun kapasitas dalam melakukan pengelolaan pasca bencana ini, terutama dalam kondisi kejadian bencana yang berkepanjangan Pemerintah melalui BNPB juga sudah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang merupakan program pemerintah lintas sektor yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peran masing-masing kementerian diatur dalam Renas PB sehingga masing- masing kementrian wajib menyusun renstra yang berperspektif pengurangan risiko bencana. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat ini dibangun atas lima pilar, berupa subsistem legislasi, perencanan, kelembagan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas dan Kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Penyebarluasan kepada publik informasi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana,
2. Penyelengaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menulis informasi terkait bencana dan atau pelatihan bentuk lain, dan
3. Penyelenggaraan penelitian bersama terkait upaya pengurangan risiko bencana. Dan Pada Sustainable Development Goals (SDGS) ke 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim Dan Penanggulangan Kebencanaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) memiliki tujuan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya karena perubahan iklim adalah tantangan global yang memengaruhi setiap orang, berikut target, tujuan, arah kebijakan, strategis dan Program Kegiatan :

*Tabel. 2.13*

*Tabel Tujuan, Sasaran, dan Idikator Sasaran berdasarkan Isu Strategis*

| **Isu Strategis** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran (Dampak)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Belum optimalnya penanganan permasalahan banjir | Meningkatkan identifikasi dan pengelolaan risiko bencana, dengan fokus pada mitigasi dan pengurangan dampak banjir. | Melakukan pengerukan dan pemeliharaan rutin di hulu sungai untuk mencegah sedimentasi. | * Meningkatnya efisiensi dalam respons bencana karena adanya pusat komando. * Berkurangnya waktu respons bencana. * Terjadinya peningkatan koordinasi antarlembaga saat keadaan darurat. |
| Adanya dampak perubahan Lahan | Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. | Meningkatkan praktik pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah di sungai dan sistem drainase. | * Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dan respons bencana. * Meningkatnya tingkat partisipasi dalam latihan simulasi bencana. * Meningkatnya ketahanan masyarakat lokal melalui program edukasi. |
| Belum optimalnya pengarusutamaan program mitigasi | Melakukan naturaliasasi kawasan hulu sungai untuk mencegah banjir. | Membangun dan memasang alat penyaring endapan di sungai untuk mengurangi penumpukan sedimen. | * Berkurangnya waktu penyebaran informasi peringatan dini. * Meningkatnya aksesibilitas informasi bencana bagi publik. * Meningkatnya kemampuan pemantauan realtime untuk risiko bencana. |
| Dampak bencana hidrometeorologi, perubahan iklim | Melakukan konservasi lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air. | Memetakan penyebab utama banjir dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir. | * Berkurangnya kejadian banjir perkotaan karena peningkatan sistem drainase. * Meningkatnya keamanan masyarakat dengan tersedianya tempat evakuasi sementara. * Berkurangnya biaya pemeliharaan melalui infrastruktur mitigasi bencana yang terawat. |
| Kapasitas masyarakat yang rendah sehingga berpotensi menimbulkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) | Memperkuat sosialisasi, komunikasi, penyebaran informasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. | Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan dan program peningkatan kesadaran. | * Meningkatnya mobilisasi sumber daya untuk upaya penanggulangan bencana. * Meningkatnya efektivitas respons bencana melalui kemitraan publik dan swasta. * Terjadinya keterlibatan lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan manajemen bencana. |

**2.3.3. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Penanggulangan Bencana Daerah telaahan, tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis BPBD Kota Bekasi.

1. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa barat

Tujuan pembangunan sub urusan penanggulangan bencana menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat adalah “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana” Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatnya Nilai ketahanan Daerah dalam Penanggulangan bencana, Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat, tercantum pada tabel berikut :

*Tabel 2.16*

*Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambatan dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

| **No** | **Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jawa Barat** | **Permasalahan Pelayanan BPBD Kota**  **Bekasi** | **Sebagai Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1. | Meningkatnya Nilai ketahanan Daerah dalam Penanggulangan bencana | * Tersedinya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum di tetapkan menjadi Peratural Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.. * Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal. * Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas; * Belum tersedinya kajian risiko bencana sampai   tingkat kelurahan; | * Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ancaman risiko bencana; * Belum adanya kebijakan operasional penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah ; * Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan   berkualitas | * Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan risiko bencana; * Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas. * Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan   massif. |

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang termuat pada RTRW Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.17*

*Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugasdan Fungsi Perangkat**  **Daerah** | **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1. | Kebijakan penataan ruang:   * peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana | * Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; * Belum terbangunnya bendungan atau polder berskala besar di wilayah hulu atau cileungsi; * Belum terbangunnya sistem peringatan dini melalui pembangunan ruang server kamera cctv yang representatif. | Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas | * Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan massif; * Tersedianya dokumen- dokumen kebencanaan yang cukup lengkap; * Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KELANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) terus dilakukan. |
| 2. | Strategi Penataan Ruang   * mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana; * mengintegrasikan pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan * mendorong   perwujudan kota tangguh bencana |

**2.3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang penanggulangan bencana. Isu strategis pembangunan bidang penanggulangan bencana disusun berdasarkan :

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Sasaran strategis pembangunan bidang Bencana di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Sasaran strategis pembangunan bidang Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang. Hal ini sejalan dengan amanat RPD Kota Bekasi, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dan Berdasarkan telaah-telaah tersebut, maka dirumuskan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk 5 (Lima) tahun ke depan adalah “ Meningkatnya upaya penanggulangan bencana di kota Bekasi melalui peran serta masyarakat” dan untuk menjawab isu strategis tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi harus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarak baik pada fase Pra-bencana, Saat-bencana dan Pasca Bencana.

*Tabel. 2.18. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

| **Potensi Daerah yang menjadi kewenangan BPBD** | **Permasalahan** | **Isu KLHS yang Relevan dengan BPBD** | **Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BPBD** | | | **Isu Strategis BPBD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Global** | **Nasional** | **Regional** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kewenangan dalam hal Penanggulangan bencana di tingkat daerah, meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. | * Kurangnya ketersediaan saluran drainase dan penanganan banjir * Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; * Belum terbangunnya bendungan atau polder berskala besar di wilayah hulu atau cileungsi; * Belum terbangunnya sistem peringatan dini melalui pembangunan ruang server kamera cctv yang representatif. | * Perubahan iklim dan peningkatan Risiko Bencana * Kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang terbuka hijau * Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan * Peningkatan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana | Trend kejadian  bencana pada  prinsipnya  mengalami  peningkatan, banjir,  tsunami, gempa  bumi, kekeringan,  tanah longsor dan  puting beliung  seiring dengan  dampak perubahan  iklim global dan  rusaknya  ekosistem. | * Belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana * Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap Upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. | * Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan * Kurangnya informasi/pengetahuan kesiapsiagaan bencana * Pola Pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana | * Peningkatan partisipasi dan budaya masyarakat dalam bidang mitigasi bencana * Penguatan kapasitas BPBD dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan infrastruktur * Perbaikan sistem peringatan dini dan respons cepat dalam menghadapi bencana * Peningkatan koordinasi dalam penataan pola tata ruang dan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana * Peningkatan kerjasama antar instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam penanggulangan bencana |

**2.8. Indek Risiko Bencana**

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota. Selanjutnya, buku ini juga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain. Informasi tingkat risiko bencana ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

Dimana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

*Tabel 2.19*

*Indeks Risiko Bencana Kota Bekasi*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kota** | **Skor** | **Kelas** |
| 1. | Kota Bekasi | 111,58 | Sedang |
| No | Jenis Bencana | Skor | Kelas |
| 1 | Indeks Risiko Bencana Banjir | 20.52 | Tinggi |
| 2 | Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi | 13.19 | Tinggi |
| 3 | Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor | 6.84 | Sedang |
| 4 | Indeks Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan | 13.68 | Tinggi |
| 5 | Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | 12.46 | Tinggi |
| 6 | Indeks Risiko Bencana Kekeringan | 13.68 | Tinggi |

Sumber : Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024

Berdasarkan nilai dari tabel indeks risiko bencana untuk Kota Bekasi dapat dikategori Sedang dengan Nilai Skor 111,58 dan beberapa jenis potensi bencana yang terjadi dan akan terjadi di Kota Bekasi yang masuk kategori tinggi diantara nya :

1. Banjir;
2. Gempa Bumi;
3. Kebakaran hutan dan lahan;
4. Kekeringan dan;
5. Cuaca ekstrim.

Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai stekholder dalam urusan bencana lebih mengoptimal kinerja pelayanan penanggulangan bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kepada warga Kota Bekasi, dan dalam urusan penanggulangan bencana menjadi urusan Bersama baik unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Penta Helix serta Masyarakat dan mewujudkan Kota Bekasi yang Tangguh dalam menghadapi bencana.

# BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas arah yang akan dicapai oleh organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1

Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2929

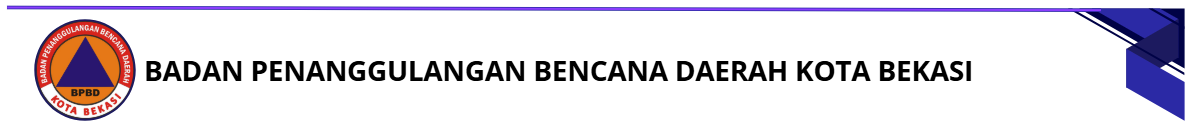


Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Gambar 3.2

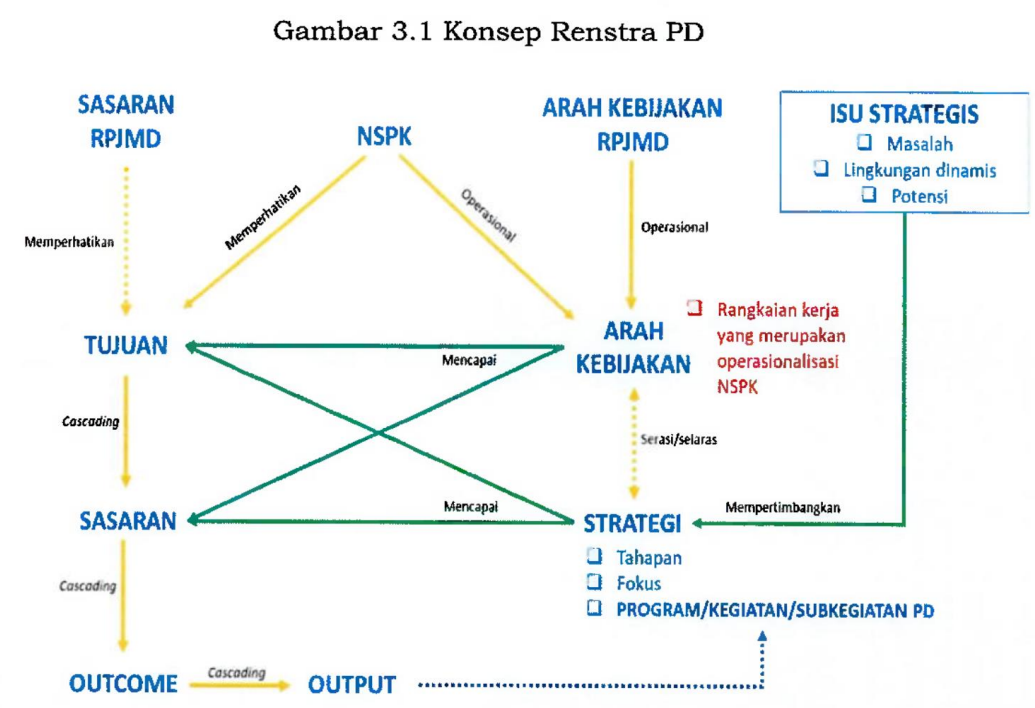
Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029





Gambar 3.3

Konsep Renstra Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sesuai dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu;

a. Tujuan ke-1, berkenaan dengan “Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”;

* + 1. Tujuan Ke-1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 menetapkan Tujuan ke-1 yaitu Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari. Indikator tujuan yang ditetapkan RPJMD adalah tercapainya adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Oleh karena itu tujuan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim” dengan indikator tujuan Meningkatnya Indeks Risiko Bencana.

* 1. **Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daearh Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata yang akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran jangka menengah merupakan bagian internal dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

* + 1. Sasaran terkait Tujuan Ke-1

Berdasarkan tujuan ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastrutur Modern dan Lestari ditetapkanlah sasaran strategis ke-3 yaitu Terwujudnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran strategis ini memiliki indikator sasaran, yaitu Indeks Resiko Bencana.

Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sasaran strategis Kota ini diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah dengan sasaran “Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim”, dengan indikator sasaran yaitu Indeks Risiko Bencana.

**Tabel 3.3**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **SATUAN** | **BASELINE**  **2024** | **TARGET TAHUN** | | | | | | **KET** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **(1)** | **(2)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** |
| **Visi " Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"  Tujuan Ke-1** Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari **dengan Sasaran :** Meningkatnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari |  | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 111,58 | 111,0 | 110,5 | 110,0 | 109,5 | 109,0 | 108,50 |  |
|  |  | Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana | Nilai Indeks Ketahan Daerah (IKD) | Nilai | - | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |  |

Untuk mengatur standar pelayanan minimal diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya mengharuskan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 menerapkan standar pelayanan minimal pada enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan target dan realisasi sebesar 100 persen setiap tahun.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemendagri mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar, termasuk pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri 101/2018 tentang Standar pelayanan Minimum mengatur mengenai standar teknis pelayanan dasar sub-urusan bencana yang meliputi:

1. jenis pelayanan dasar.

2. mutu pelayanan dasar.

3. kriteria penerima.

4. tata cara pemenuhan standar teknis.

Sedangkan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/ kota meliputi:

1. pelayanan informasi rawan bencana.
2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   1. **Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Dalam formulasi Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disebutkan isu strategis terkait pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan yaitu “Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan logistik serta sarana prasarana dalam menghadapi bencana yang berskala besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi”.

Strategi dibuat untuk merumuskan perencanaan yang komprehensif, terutama terkait dengan bagaimana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dalam Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana daerah yang selaras dengan strategi serta rencana program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Strategi jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menunjukkan bagaimana cara Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengembangan sistem dan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan kemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada, serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penyelamatan dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

* 1. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  2. Pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam penaggulangan bencana;
  3. Pemenuhan dokumen KRB dan PRB yang sudah di legalkan;
  4. Optimalisasi kerjasama dan pembangunan sistem dalam rangka layanan penanggulangan bencana.

**Tabel 3.3**

**Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahap I (2025)** | **Tahap II (2026)** | **Tahap III (2027)** | **Tahap IV (2028)** | **Tahap V (2029)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| * Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana * Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana * Pemenuhan dokumen KRB dan PRB yang dilegalkan | * Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana * Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana | * Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana * Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana | * Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana * Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana * Optimalisasi kerjasama dan pembangunan sistem dalam rangka layanan penanggulangan bencana. | * Pemenuhan sarana dan prasana Penanggulangan Bencana * Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana |

**3.4. Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

* Peningkatan Sarana dan Prasarana: Mengembangkan saran dan prasarana penanggulangan bencana, seperti membangun bangunan tahan gempa, penghijauan, dan penyediaan sistem informasi peringatan dini.
* Penguatan Sistem Kesiapsiagaan: Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dalam mengantisipasi bencana.

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Darurat

* Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana: Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana agar cepat dan andal.
* Peningkatan Profesionalitas Aparatur: Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemulihan Bencana

* Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan dan memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bencana.
* Percepatan Pemulihan: Mendorong percepatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama

* Koordinasi Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tabel 3.4

Strategi dan Arah Kebijakan Penangulangan Bencana

|  |  |
| --- | --- |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat | Menetapkan prosedur dan tata kelola kelembagaan yang jelas dalam penanggulangan bencana, termasuk pembentukan pusat komando dan koordinasi darurat. |
| Pemberdayaan Masyarakat | Mengintegrasikan program pendidikan dan pelatihan kebencanaan bagi masyarakat dalam agenda pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan simulasi bencana, sosialisasi penanggulangan bencana, dan pengembangan kurikulum sekolah terkait kebencanaan. |
| Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan | Membangun sistem informasi kebencanaan yang mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem nasional untuk memantau dan menyebarluaskan informasi terkait risiko bencana dan peringatan dini secara real-time. |
| Peningkatan Infrastruktur Mitigasi | Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penanggulangan bencana, seperti drainase kota, kanal pengendali banjir, tempat evakuasi sementara, dan penyediaan peralatan keselamatan. |
| Kolaborasi Antar Lembaga | Membentuk kemitraan dengan pihak swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam penyediaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, serta memastikan keterlibatan aktif semua pihak dalam setiap tahap manajemen bencana. |

# BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

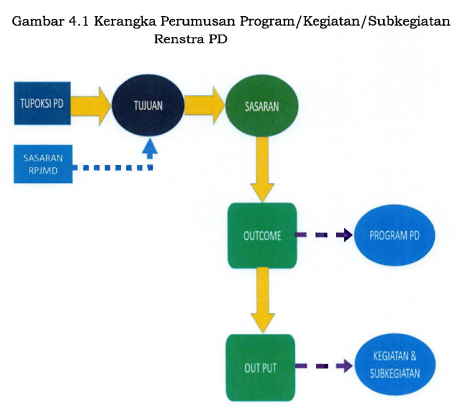
**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rencana Program, kegiatan dan Sub.Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang di akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

*Gambar 4.1*

*Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan*

*Renstra PD*



*Tabel 4.1*

*Rencana Program, kegiatan dan Sub.Kegiatan*

| **PROGRAM KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB.KEGIATAN** |
| --- | --- |
| **Program Penanggulangan Bencana** | **Prosentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** |
| **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya layanan informasi rawan bencana** |
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun |
| **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Tersedianya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** |
| Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana |
| Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun |
| Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam |
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun |
| **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** |
| Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** | **Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran** |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran** |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Optimalisasi Disiplin Aparatur** |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi |

*Tabel 4.3*

*Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi*

*Tahun 2026-2030*

| **BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT** | **INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT** | **BASELINE TAHUN 2024** | **TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN** | | | | | | | | | | **PERANGKAT DAERAH** | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** | **TARGET** | **PAGU** |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  |  |  | 12.297.320.438 |  | 12.714.276.735 |  | 13.110.656.181 |  | 13.559.481.693 |  | 14.041.986.140 |  |  |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |  | 6.919.651.000 |  | 7.058.044.020 |  | 7.128.624.461 |  | 7.271.196.949 |  | 7.416.620.887 |  |  |
| Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan | Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan (%) | 87,58 | 100 | 5.274.675.000 | 100 | 5.380.168.500 | 100 | 5.433.970.185 | 100 | 5.542.649.589 | 100 | 5.653.502.580 | 1.06.1.05.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |
| 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  | 5.274.675.000 |  | 5.380.168.500 |  | 5.433.970.185 |  | 5.542.649.589 |  | 5.653.502.580 |  |  |
| Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 405 | 1.596 | 5.274.675.000 | 1.596 | 5.380.168.500 | 1.596 | 5.433.970.185 | 1.596 | 5.542.649.589 | 1.596 | 5.653.502.580 |  |  |
|  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 24 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  | 5.271.750.000 |  | 5.377.185.000 |  | 5.430.956.850 |  | 5.539.575.987 |  | 5.650.367.507 |  |  |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 405 | 1.596 | 5.271.750.000 | 1.596 | 5.377.185.000 | 1.596 | 5.430.956.850 | 1.596 | 5.539.575.987 | 1.596 | 5.650.367.507 |  |  |
| 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |  | 2.925.000 |  | 2.983.500 |  | 3.013.335 |  | 3.073.602 |  | 3.135.073 |  |  |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 24 | 4 | 2.925.000 | 4 | 2.983.500 | 4 | 3.013.335 | 4 | 3.073.602 | 4 | 3.135.073 |  |  |
| Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran | Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran (%) | 100 | 100 | 21.955.000 | 100 | 22.394.100 | 100 | 22.618.041 | 100 | 23.070.401 | 100 | 23.531.810 |  |  |
| 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  | 21.955.000 |  | 22.394.100 |  | 22.618.041 |  | 23.070.401 |  | 23.531.810 |  |  |
| Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | - | 2 | 21.955.000 | 2 | 22.394.100 | 2 | 22.618.041 | 2 | 23.070.401 | 2 | 23.531.810 |  |  |
|  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 19 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  |  | 19.340.000 |  | 19.726.800 |  | 19.924.068 |  | 20.322.549 |  | 20.729.000 |  |  |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | - | 2 | 19.340.000 | 2 | 19.726.800 | 2 | 19.924.068 | 2 | 20.322.549 | 2 | 20.729.000 |  |  |
| 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |  | 2.615.000 |  | 2.667.300 |  | 2.693.973 |  | 2.747.852 |  | 2.802.810 |  |  |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 19 | 6 | 2.615.000 | 6 | 2.667.300 | 6 | 2.693.973 | 6 | 2.747.852 | 6 | 2.802.810 |  |  |
| Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah (Nilai) | 86,92 | 87,17 | 489.983.000 | 87,42 | 499.782.660 | 87,67 | 504.780.487 | 87,92 | 514.876.096 | 88,17 | 525.173.618 |  |  |
| 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  |  | 489.983.000 |  | 499.782.660 |  | 504.780.487 |  | 514.876.096 |  | 525.173.618 |  |  |
| Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | - | 25 | 489.983.000 | 25 | 499.782.660 | 25 | 504.780.487 | 25 | 514.876.096 | 25 | 525.173.618 |  |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | - | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |  |  |  | 266.733.000 |  | 272.067.660 |  | 274.788.337 |  | 280.284.103 |  | 285.889.785 |  |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | - | 3 | 266.733.000 | 1 | 272.067.660 | 1 | 274.788.337 | 1 | 280.284.103 | 1 | 285.889.785 |  |  |
| 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  |  |  | 223.250.000 |  | 227.715.000 |  | 229.992.150 |  | 234.591.993 |  | 239.283.833 |  |  |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | - | 25 | 223.250.000 | 25 | 227.715.000 | 25 | 229.992.150 | 25 | 234.591.993 | 25 | 239.283.833 |  |  |
| Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel (%) | 100 | 100 | 1.133.038.000 | 100 | 1.155.698.760 | 100 | 1.167.255.748 | 100 | 1.190.600.863 | 100 | 1.214.412.879 |  |  |
| 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  | 449.288.000 |  | 458.273.760 |  | 462.856.498 |  | 472.113.628 |  | 481.555.900 |  |  |
| Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1.920 | 12 | 449.288.000 | 12 | 458.273.760 | 12 | 462.856.498 | 12 | 472.113.628 | 12 | 481.555.900 |  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 84 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  |  |  | 152.545.000 |  | 155.595.900 |  | 157.151.859 |  | 160.294.896 |  | 163.500.794 |  |  |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | 3 | 152.545.000 | 3 | 155.595.900 | 3 | 157.151.859 | 3 | 160.294.896 | 3 | 163.500.794 |  |  |
| 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  |  | 48.470.000 |  | 49.439.400 |  | 49.933.794 |  | 50.932.470 |  | 51.951.119 |  |  |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 1 | 48.470.000 | 1 | 49.439.400 | 1 | 49.933.794 | 1 | 50.932.470 | 1 | 51.951.119 |  |  |
| 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  |  | 38.480.000 |  | 39.249.600 |  | 39.642.096 |  | 40.434.938 |  | 41.243.637 |  |  |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 12 | 38.480.000 | 12 | 39.249.600 | 12 | 39.642.096 | 12 | 40.434.938 | 12 | 41.243.637 |  |  |
| 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  | 207.000.000 |  | 211.140.000 |  | 213.251.400 |  | 217.516.428 |  | 221.866.757 |  |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 84 | 12 | 207.000.000 | 12 | 211.140.000 | 12 | 213.251.400 | 12 | 217.516.428 | 12 | 221.866.757 |  |  |
| 1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |  |  | 2.793.000 |  | 2.848.860 |  | 2.877.349 |  | 2.934.896 |  | 2.993.593 |  |  |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1.920 | 12 | 2.793.000 | 12 | 2.848.860 | 12 | 2.877.349 | 12 | 2.934.896 | 12 | 2.993.593 |  |  |
| 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | 78.000.000 |  | 79.560.000 |  | 80.355.600 |  | 81.962.712 |  | 83.601.966 |  |  |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai NSPK | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 78.000.000 | 12 | 79.560.000 | 12 | 80.355.600 | 12 | 81.962.712 | 12 | 83.601.966 |  |  |
| 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  | 78.000.000 |  | 79.560.000 |  | 80.355.600 |  | 81.962.712 |  | 83.601.966 |  |  |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 78.000.000 | 12 | 79.560.000 | 12 | 80.355.600 | 12 | 81.962.712 | 12 | 83.601.966 |  |  |
| 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | 605.750.000 |  | 617.865.000 |  | 624.043.650 |  | 636.524.523 |  | 649.255.013 |  |  |
| Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 120 | 120 | 605.750.000 | 120 | 617.865.000 | 120 | 624.043.650 | 120 | 636.524.523 | 120 | 649.255.013 |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  | 148.500.000 |  | 151.470.000 |  | 152.984.700 |  | 156.044.394 |  | 159.165.282 |  |  |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 1 | 148.500.000 | 2 | 151.470.000 | 2 | 152.984.700 | 2 | 156.044.394 | 2 | 159.165.282 |  |  |
| 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |  | 376.250.000 |  | 383.775.000 |  | 387.612.750 |  | 395.365.005 |  | 403.272.305 |  |  |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 18 | 18 | 376.250.000 | 18 | 383.775.000 | 18 | 387.612.750 | 18 | 395.365.005 | 18 | 403.272.305 |  |  |
| 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |  | 81.000.000 |  | 82.620.000 |  | 83.446.200 |  | 85.115.124 |  | 86.817.426 |  |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 120 | 120 | 81.000.000 | 120 | 82.620.000 | 120 | 83.446.200 | 120 | 85.115.124 | 120 | 86.817.426 |  |  |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |  |  |  | 5.377.669.438 |  | 5.656.232.715 |  | 5.982.031.720 |  | 6.288.284.744 |  | 6.625.365.253 |  |  |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) | 100 | 100 | 5.377.669.438 | 100 | 5.656.232.715 | 100 | 5.982.031.720 | 100 | 6.288.284.744 | 100 | 6.625.365.253 | 1.06.1.05.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |
|  | persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan (%) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana (%) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 199.200.000 |  | 209.518.560 |  | 221.586.829 |  | 232.932.075 |  | 245.417.234 |  |  |
| Jumlah layanan informasi rawan bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | - | 1.000 | 199.200.000 | 1.000 | 209.518.560 | 1.000 | 221.586.829 | 1.000 | 232.932.075 | 1.000 | 245.417.234 |  |  |
|  | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 12 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |  |  |  | 199.200.000 |  | 209.518.560 |  | 221.586.829 |  | 232.932.075 |  | 245.417.234 |  |  |
| Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | - | 1.000 | 199.200.000 | 1.000 | 209.518.560 | 1.000 | 221.586.829 | 1.000 | 232.932.075 | 1.000 | 245.417.234 |  |  |
| 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 12 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |
| 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |  |  |  | 4.694.714.000 |  | 4.937.900.185 |  | 5.222.323.236 |  | 5.489.679.186 |  | 5.783.954.437 |  |  |
| Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | - | 1.000 | 4.694.714.000 | 1.000 | 4.937.900.185 | 1.000 | 5.222.323.236 | 1.000 | 5.489.679.186 | 1.000 | 5.783.954.437 |  |  |
|  | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | - | - |  | 2.100 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 132 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 120 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 168 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | - | - | 0 | 2.100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |
| 1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam |  |  |  | 227.400.000 |  | 239.179.320 |  | 252.956.049 |  | 265.907.399 |  | 280.160.035 |  |  |
| Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | - | 1.000 | 227.400.000 | 1.000 | 239.179.320 | 1.000 | 252.956.049 | 1.000 | 265.907.399 | 1.000 | 280.160.035 |  |  |
| 1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 120 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |
| 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota |  |  |  | 238.060.000 |  | 250.391.508 |  | 264.814.059 |  | 278.372.539 |  | 293.293.307 |  |  |
| Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | 1 | 238.060.000 | 1 | 250.391.508 | 1 | 264.814.059 | 1 | 278.372.539 | 1 | 293.293.307 |  |  |
| 1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 3.803.214.000 |  | 4.000.220.485 |  | 4.230.633.185 |  | 4.447.214.604 |  | 4.685.613.754 |  |  |
| Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 168 | 12 | 3.803.214.000 | 12 | 4.000.220.485 | 12 | 4.230.633.185 | 12 | 4.447.214.604 | 12 | 4.685.613.754 |  |  |
| 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 113.160.000 |  | 119.021.688 |  | 125.877.337 |  | 132.322.257 |  | 139.414.730 |  |  |
| Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 12 | 1 | 113.160.000 | 1 | 119.021.688 | 1 | 125.877.337 | 1 | 132.322.257 | 1 | 139.414.730 |  |  |
| 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 312.880.000 |  | 329.087.184 |  | 348.042.606 |  | 365.862.387 |  | 385.472.611 |  |  |
| Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 132 | 5 | 312.880.000 | 5 | 329.087.184 | 5 | 348.042.606 | 5 | 365.862.387 | 5 | 385.472.611 |  |  |
| 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |  |  |  | 483.755.438 |  | 508.813.970 |  | 538.121.655 |  | 565.673.483 |  | 595.993.582 |  |  |
| Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 262 | 1.500 | 483.755.438 | 1.500 | 508.813.970 | 1.500 | 538.121.655 | 1.500 | 565.673.483 | 1.500 | 595.993.582 |  |  |
|  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 133 | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  |  |  |
| 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 210.000.000 |  | 220.878.000 |  | 233.600.573 |  | 245.560.922 |  | 258.722.988 |  |  |
| Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 133 | 145 | 210.000.000 | 145 | 220.878.000 | 145 | 233.600.573 | 145 | 245.560.922 | 145 | 258.722.988 |  |  |
| 1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | 273.755.438 |  | 287.935.970 |  | 304.521.082 |  | 320.112.561 |  | 337.270.594 |  |  |
| Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 262 | 1.500 | 273.755.438 | 1.500 | 287.935.970 | 1.500 | 304.521.082 | 1.500 | 320.112.561 | 1.500 | 337.270.594 |  |  |
| 1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Jumlah aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |
| 1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |
| Jumlah program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

**4.1.1 Program Penanggulangan Bencana**

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, dengan mengedepankan kerjasama multipihak sebagai kunci keberhasilan dalam pengelolaan risiko dan penanggulangan bencana. Berdasarkan analisis Isu Strategis, Dokumen Perencanaan RPJP, RPJMD dan Rencana Kerja Penanggulangan Bencana Kota Pangkal Pinang, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, satu konsep utama yang dapat ditentukan dalam penyusunan strategi Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Pangkalpinang adalah:

**“Terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan”**

Konsep ini menjelaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, peningkatan kapasitas, dan kerja sama antar lembaga. Fokus utamanya adalah menciptakan ketangguhan komunitas melalui pendekatan pencegahan dan kesiapsiagaan, sekaligus memastikan adanya keterpaduan kebijakan dan program di tingkat daerah yang sejalan dengan peraturan nasional. Selain itu, konsep ini mengintegrasikan pengembangan sistem informasi kebencanaan, peningkatan infrastruktur, dan penyusunan rencana kontinjensi yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan ini menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, tercipta ketangguhan kolektif yang siap menghadapi segala bentuk bencana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan, strategi, konsep utama, arah strategi, dan arah kebijakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi, berikut adalah rumusan program kebijakan dan program kegiatan:

1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana;
2. Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Komando Darurat;
3. Penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) Penanggulangan Bencana;
4. Edukasi dan Sosialisasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kapasitas Masyarakat;
5. Simulasi Bencana dan Pelatihan Kesiapsiagaan untuk Komunitas Lokal;
6. Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Bencana;
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir;
8. Pemetaan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Aman;
9. Pembentukan Jaringan Kemitraan Penanggulangan Bencana;
10. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tentang Penanggulangan Bencana.

Tabel 4.4

## Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **STRATEGI** | **PROGRAM** | **KEGIATAN** | **SUB KEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | Pengurangan Beban Pengeluaran | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi korban Bencana Kabupaten / Kota |  |
|  |  |  | Penyediaan Logistic Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota |
| 2 | Peningkatan Kualitas Diri dan Keluarga | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota |

**4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

* + 1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain : perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan.

*Tabel 4.3*

*Indikator Kinerja Utama Penyelenggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator sasaran** | **Satuan** | **Kondisi Awal (2024)** | **Target kinerja tahun ke** | | | | | **Target Ahkir Renstra** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1. | Meningkatnya Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana | Meningkatnya Mitigasi dan Pengendalian Bencana Secara  Terpadu | indeks resiko bencana | Nilai | 111.58 | 111.0 | 110.5 | 110.0 | 109.5 | 109.0 | 109.0 |
| 2. | Mewujudkan akuntabilitas pelayanan pada BPBD | Nilai AKIP BPBD | Meningkatnya Kinerja pelayanan Publik dan Akuntabilitas  kinerja BPBD | Nilai AKIP BPBD | Nilai | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 |

* + 1. Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk urusan bencana masuk kepada urusan Trantibumlinmas untuk Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) setiap Tahunnya, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Bertanggung jawab atas capaian Kinerja yang di laporkan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bagian Tata pemerintah, Berikut IKK yang di ampuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi diantaranya sebagai berikut :

*Tabel 4.4*

*Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IKK Outcome | Rumus Perhitungan | Target | Perangkat Daerah |
| 1 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana |  | 100 % | BPBD Kota Bekasi |
| 2 | Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |  | 100 % | BPBD Kota Bekasi |
| 3 | Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |  | 100 % | BPBD Kota Bekasi |
| 4 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal |  | 100 % | BPBD Kota Bekasi |
| 5 | Persentase penanganan pra bencana |  | 100 % | BPBD Kota Bekasi |
| 6 | Persentase penanganan pasca bencana |  | 100 % | BPBD Kota Bekasi |
| 7 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |  | 100 % | BPBD Kota Bekasi |

Dari Indikator Kinerja Kunci diatas akan menjadi bahan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi atas capaian kinerja selama satu tahun Anggaran, dan menjadi pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Pemerintah Pusat.

* + 1. Indikator Standar Pelayanan Minimal

*Tabel 4.5*

*Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)*

*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Perangkat Daerah** |
|  | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | BPBD KOTA BEKASI |
|  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | BPBD KOTA BEKASI |
|  | Pelayanan penyelaaytan dan evakuasi korban bencana | Jumlah wraga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | BPBD KOTA BEKASI |

# BAB V PENUTUP

**5.1. Kesimpulan**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara simultan dan memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

**5.2. Kaidah Pelaksanaan Umum**

Berkenaan dengan implementasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi setiap tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang berpedoman pada Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Bekasi setiap tahunnya.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala.
4. Meskipun dokumen Renstra Tahun 2025-2029 ini adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.

**5.3. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Renstra Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
4. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bekasi, 2025

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI,

PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19741012 200604 1 016